

## TINDAK LANJUT

### REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023

1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2)

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diundangkan dan berlaku pada tanggal 5 Januari 2022. Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>c. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022</p>	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	-	<p>Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dalam proses penyusunan</p>	<p>Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	

2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3)

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diundangkan dan berlaku pada tanggal 5 Januari 2022. Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>c. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022</p>	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	-	<p>Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dalam proses penyusunan</p>	<p>Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	

3. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4)

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diundangkan dan berlaku pada tanggal 5 Januari 2022. Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>c. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022</p>	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	-	<p>Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dalam proses penyusunan</p>	<p>Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	

4. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3)

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diundangkan dan berlaku pada tanggal 5 Januari 2022. Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>c. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022</p>	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	-	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dalam proses penyusunan	Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 6)

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diundangkan dan berlaku pada tanggal 5 Januari 2022. Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>c. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022</p>	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	-	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dalam proses penyusunan	Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diundangkan dan berlaku pada tanggal 5 Januari 2022. Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>c. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022</p>	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	-	<p>Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dalam proses penyusunan</p>	<p>Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	

7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 4)

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diundangkan dan berlaku pada tanggal 5 Januari 2022. Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>c. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022</p>	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	-	<p>Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dalam proses penyusunan</p>	<p>Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	

8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 5)

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diundangkan dan berlaku pada tanggal 5 Januari 2022. Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>c. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022</p>	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	-	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dalam proses penyusunan	Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 10)

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diundangkan dan berlaku pada tanggal 5 Januari 2022. Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>c. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022</p>	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	-	<p>Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dalam proses penyusunan</p>	<p>Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 1

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diundangkan dan berlaku pada tanggal 5 Januari 2022. Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>c. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022</p>	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	-	<p>Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dalam proses penyusunan</p>	<p>Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 10)

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diundangkan dan berlaku pada tanggal 5 Januari 2022. Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>c. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022</p>	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	-	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dalam proses penyusunan	Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 11)

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diundangkan dan berlaku pada tanggal 5 Januari 2022. Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>c. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022</p>	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	-	<p>Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dalam proses penyusunan</p>	<p>Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	

14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 2)

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diundangkan dan berlaku pada tanggal 5 Januari 2022. Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>c. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022</p>	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	-	<p>Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dalam proses penyusunan</p>	<p>Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	

15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27)

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diundangkan dan berlaku pada tanggal 5 Januari 2022. Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>c. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022</p>	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	-	<p>Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dalam proses penyusunan</p>	<p>Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 4)

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diundangkan dan berlaku pada tanggal 5 Januari 2022. Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>c. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022</p>	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	-	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dalam proses penyusunan	Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 41)

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diundangkan dan berlaku pada tanggal 5 Januari 2022. Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>c. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022</p>	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	-	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dalam proses penyusunan	Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2)2)

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diundangkan dan berlaku pada tanggal 5 Januari 2022. Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>c. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022</p>	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	-	<p>Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dalam proses penyusunan</p>	<p>Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	

19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 60

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diundangkan dan berlaku pada tanggal 5 Januari 2022. Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>c. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022</p>	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	-	<p>Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dalam proses penyusunan</p>	<p>Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	

20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1)

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diundangkan dan berlaku pada tanggal 5 Januari 2022. Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>c. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022</p>	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	-	<p>Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dalam proses penyusunan</p>	<p>Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	

21. Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	Terdapat perubahan dalam mekanisme usulan hibah, pelaporan hibah, pertanggung jawaban hibah dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial perlu diganti	Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial	-	Rancangan Peraturan Wali Kota Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial	Draft Rancangan Peraturan Wali Kota Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial	

22. Peraturan Wali Kota Nomor 133 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	Terdapat perubahan dalam Majelis Pertimbangan Kode Etik, pengaduan pelanggaran kode etik dan Putusan sidang Majelis Pertimbangan, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 133 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo perlu diganti	Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 133 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	-	Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 133 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Draft Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 133 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	

23. Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	Terdapat perubahan dalam Tujuan penggunaan BLT-DBHCHT dan Penerima BLT-DBHCHT, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu diganti	Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	-	Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Draft Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	

24. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Kota Probolinggo

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Kota Probolinggo dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti	Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Kota Probolinggo	-	Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Kota Probolinggo	Draft Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Kota Probolinggo	

25. Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	Terdapat perubahan dalam tujuan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Pemberian penghargaan dan penganggaran atas pencapaian kinerja bagi Ketua Rukun Tetangga; Ketua Rukun Warga dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu diubah.	Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	-	Rancangan Peraturan Wali Kota tentang perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Draft Rancangan Peraturan Wali Kota tentang perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	

26. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Probolinggo

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		PROGRES TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	KET
		REGULASI	NON REGULASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	Terdapat perubahan dalam Alokasi pembagian insentif sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Probolinggo perlu diubah.	Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Probolinggo	-	Rancangan Peraturan Wali Kota tentang perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Probolinggo	Draft Rancangan Peraturan Wali Kota tentang perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Probolinggo	

a.n. WALI KOTA PROBOLINGGO

SEKRETARIS DAERAH

u.b

ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN


  
**MADIHAH, S.K.M.**  
 Pembina  
 NIP. 197503121997032003